

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai negara kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk memajukan integritas, keadilan, dan sangat relevan maupun dari sisi ekonomi. Kasus kesetaraan gender yang banyak terjadi adalah kaum perempuan, yakni pada posisi bagaimana meyamakan posisi perempuan sama dengan laki-laki.

Jika berbicara gender yang saat ini semakin meluas di masyarakat, tidak lagi dibatasi oleh ruang akademik, pekerjaan maupun posisi di dalam rumah tangga. Permasalahan antara perempuan dan gender pun saat ini tidak lagi menjadi wacana elit yang didominasi akademisi, aktivis dan pengambilan keputusan. Permasalahan Kesetaraan gender yang sudah lama menjadi isu global ini sering menimbulkan konflik yang menonjol yaitu perempuan sebagai peran ganda.

Istilah kesetaraan gender selalu diartikan sebagai kondisi "ketidaksetaraan" yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan sebagainya.

Di dalam sistem budaya dan sosial sebagian besar perempuan dipersepsikan semata-mata berfungsi reproduktif yang berarti perempuan hanya dianggap bisa berada di rumah saja untuk melanjutkan keturunan dengan melahirkan dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan. Perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang dianggap dan dikategorikan sebagai

pekerjaan domestik, dan hanya bisa dibebankan atau dilakukan oleh perempuan. Melahirkan dan menyusui anak merupakan sesuatu yang alamiah atau kodrati dan menjadi fungsi reproduksi pada perempuan. Namun, dalam fungsi tersebut seringkali dihubungkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga, yang dapat dikategorikan sebagai pekerjaan domestik (Lusia Palulungan, 2020,3). Karena itu membuat kaum laki-laki berpikir bahwa perempuan dianggap tidak layak bekerja di sektor publik yang “keras”, mampu bersaing, dan logis. Perempuan yang bekerja di ruang publik, membangun karir, dan bersaing dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat. Komunikasi dan hubungan di dalam keluarga adalah hubungan kekuasaan, di mana bapak menjadi penguasa, yang tidak hanya menguasai keluarga, tetapi juga membentuk keluarga dalam kekuasaan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua di dalam keluarga.

Pembagian peranan gender membuat perempuan menjadi terbatas dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, dalam dunia perpolitikan, dalam kemasyarakatan, dalam pendidikan dan budaya.

Budaya feodal Jepang membentuk tradisi masyarakat Jepang yang menyebabkan kedudukan dan fungsi wanita menjadi sangat lemah. Zaman feodal merupakan zaman dimana penyempitan ruang gerak perempuan sekaligus meredupkan eksistensi perempuan dalam sosial masyarakat. Namun, Kebiasaan-kebiasaan lama tersebut perlahan mengalami abrasi akibat dari kemajuan pendidikan pada kaum wanita. Sampai pada waktunya, kaum perempuan pun

memiliki kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki dalam bingkai budaya moderen Jepang.

Terjadinya restorasi meiji atau modernisasi Jepang menjadi titik balik bagi jepang dimana jepang menjadi negara yang maju dan kuat. Jepang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yang terjadi pada kehidupan sosial dan politik Jepang dengan diberlakukannya undang-undang meiji 1889 atau kini digantikan menjadi konstitusi 1947. Konstitusi 1947 adalah undang-undang kekaisaran Jepang dari 1889 hingga 1947. Dalam Konstitusi 1947 Jepang diminta agar lebih mengutamakan nilai-nilai demokrasi serta menjunjung hak asasi manusia. Hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan wanita Jepang yang ter subordinasi.

Pada restorasi meiji pemerintah memfokuskan pada pendidikan untuk dilakukan pembenahan karena menurut pemerintah pendidikan baik untuk membangun dan memajukan suatu bangsa serta pendidikan mampu melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang dapat memajukan suatu bangsa, dimana sebelumnya pada zaman feodal pendidikan hanya diprioritaskan pada bidang militer yang hanya dilakukan oleh kaum pria saja sehingga menyebabkan peran pria dalam masyarakat sangat menonjol sementara kaum wanita sangat kurang akan pengetahuan. Pada saat itu kedudukan antara perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan posisi yang sama. Untuk memperoleh kemakmuran, kesejahteraan dan pilihan hidup, para ibu berfikir untuk menyekolahkan putrinya dan mengemban pendidikan setinggi-tingginya. Dengan persepsi pendidikan yang tinggi, membuat putri mereka membuat banyak kemungkinan perubahan dalam hidup agar lebih baik dari orangtua dan meningkatkan derajat bagi orang tua anak tersebut.

Kesadaran perempuan akan pentingnya kesetaraan gender yang telah terbentuk mulai meningkat. Vera Mackie pada bukunya menuturkan bahwa dalam politik di priode 1980 terjadi adanya perdebatan pada sikap badan legislatif yang memarjinalkan kaum perempuan. Munculnya Doi Takako sebagai tokoh perempuan kharismatik sekaligus pemimpin pertama partai oposisi utama yaitu partai sosial demokrat pada akhir tahun 1980, terlihat sebagai sinyal pada era baru partisipasi perempuan dalam bidang politik. Ada sekitar 22 perempuan terpilih di majlis tinggi pada tahun 1989 mengalami peningkatan sekitar 10 orang dari pemilihan sebelumnya. Hal ini merupakan apa yang disebut media sebagai “*Fenomena Madonna*” (Mackie, 2003,196). Hal tersebut adalah perubahan besar dalam perpolitikan Jepang.

Perekonomian Jepang menghadapi risiko menurunnya peluang pertumbuhan. Dengan adanya faktor yang mempengaruhi berkurangnya jumlah populasi dapat berdampak kepada penurunan kapasitas pekerja dari angkatan kerja dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Jepang. Hal itu dipengaruhi perbedaan dalam perlakuan, salah satunya adalah dalam pemberian gaji dan karir serta jabatan yang sangat jauh antara laki-laki dan perempuan.

Kurangnya ketersediaan dari tenaga kerja akan memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang yang masih stagnan. Karena itu, pada masa pemerintahan Shinzo Abe mulai dilakukan kebijakan yang dikenal dengan *Womenomics*. Kebijakan dengan adanya *Womenomics* untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di pemerintahan Jepang adalah konsep dari Perdana

Menteri Shinzo Abe. Menurut Perdana Menteri Shinzo Abe, perempuan juga bisa ikut berperan di dalam bidang politik maupun perekonomian Jepang.

Jika dibandingkan dengan negara lain dengan masalah kesetaraan gender yang membaik, memang kesetaraan gender di Jepang masih sangat jauh di bawah, karena itu kesetaraan gender di Jepang harus semakin maju dan meningkat lagi. Hal tersebut bukan hanya sekedar untuk mendapatkan persamaan kedudukan dan hak dengan kaum laki-laki saja, tetapi juga untuk lebih dapat melakukan peranannya di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Para kaum perempuan kini semakin menyadari bahwasannya perempuan sebagai salah satu kekuatan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang tidak kalah pentingnya dengan kekuatan masyarakat lainnya dan juga mempunyai tanggung jawab bersama melakukan peranannya dalam masa pembangunan untuk meningkatkan ketahanan nasional untuk masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

Persoalan gender tidak hanya sampai situ saja. Sehubungan dengan adanya kesetaraan gender, ternyata banyak persoalan yang menimbulkan dampak negatif dari terealisasinya kesetaraan gender bagi masyarakat Jepang yaitu adanya fenomena *Bankonka*, *Hikonka*, *Shoushika* yang menimbulkan masalah yang serius bagi Jepang, sehingga Jepang mengalami penurunan populasi. Faktor penyebab fenomena *Shoushika* tersebut adalah salah satunya karena *Bankonka* dan *Hikonka*. *Bankonka* dan *Hikonka* sendiri memiliki faktor penyebabnya adalah perempuan yang saat ini sudah banyak yang mengenyam pendidikan tinggi bahkan bekerja di sektor publik, dan kemandirian ekonomi. Sehingga jika di analisis, faktor penyebab tersebut adalah bentuk dari kesetaraan gender di Jepang, dimana perempuan kini

sudah memiliki kedudukan yang setara dalam bidang pendidikan, karir, bahkan peran perempuan sebagai pemimpin.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti kesetaraan gender dalam masyarakat Jepang. Untuk itu penulis ingin mengangkat judul “Analisis Dampak Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Jepang”.

B. Rumusan Masalah dan Fokus Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk kesetaraan gender pada masyarakat Jepang?
- b. Bagaimana dampak negatif dalam kesetaraan gender?
- c. Bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam menanggulangi dampak negatif dalam kesetaraan gender?

2. Fokus Masalah

Agar masalah yang dibahas lebih terarah, dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada dampak kesetaraan gender dalam masyarakat Jepang dewasa ini terutama pada posisi perempuan Jepang.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui bentuk kesetaraan gender pada masyarakat Jepang.
- b. Untuk mengetahui apa saja dampak negatif pada kesetaraan gender pada masyarakat Jepang.
- c. Untuk Mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif dalam kesetaraan gender pada masyarakat Jepang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Bagi Penulis Sendiri, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Pengetahuan apa dan bagaimana bentuk kesetaraan gender serta teori yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
- 2) Bagi penulis dan pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan dampak positif dan negatif dalam kesetaraan gender pada masyarakat Jepang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Kesetaraan Gender pada masyarakat Jepang. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah bahan bacaan dan sumber penelitian untuk Program studi Sastra Jepang peraepong kampus STBA JIA

D. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki kaitan antara satu dengan lainnya. Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan yang menjadi dasar penulisan dalam penelitian selanjutnya. Bab II berisi Landasan Teoretis dan membahas tentang latar belakang yang berkaitan dengan penelitian. Bab III berisi Metodologi Penelitian, yaitu metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan meliputi waktu dan tempat penelitian, serta jenis penelitian. Prosedur Penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisis Data dan Sumber data yang digunakan dalam

proses penelitian. Bab IV Berisi Paparan Data, Analisis Data yang menjelaskan hasil penelitian yang diteliti, dianalisis dan dikaitkan dengan landasan teori yang diulas pada Bab II sehingga jelas data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan, Serta Interpretasi Hasil Penelitian. Bab V yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas oleh peneliti, kemudian ditutup dengan saran yang diberikan oleh peneliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan definisi dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini berdasarkan beberapa sumber.

1. Kesetaraan gender Menurut Puspitawati, pengertian gender ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya ataupun adat istiadat. Sedangkan Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
2. Kesetaraan gender (男女共同参) berarti bahwa setiap orang, tanpa memandang gender, berbagi tanggung jawab, hak, dan peluang secara setara dan memutuskan segalanya bersama-sama.

<https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/jinkenkurasi/tantougyoumu/danjo/7843.html> (Diakses pada 6 April 2022)

3. Womenomics menurut Helen Macnaughtan adalah teori yang menganjurkan pemberdayaan perempuan, dengan alasan bahwa memungkinkan perempuan untuk memiliki akses ke partisipasi yang sama dalam ekonomi dan masyarakat akan menghasilkan manfaat ekonomi dan kemajuan sosial.

